SATU DEKADE JADI RUMPUN TERASING : NARASI IDENTITAS DAN KEKERASAN JEMAAT AHMADIYAH DI LOMBOK

Nurhikmah

Abstrak. *Sejak masuk ke Indonesia, Jemaat Ahmadiyah selalu mengalami kontroversi, tak terkecuali di Lombok. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Lombok, telah menjadi sasaran kekerasan sejak 1998-2010 lalu. Akibatnya, bermukimlah mereka di Asrama Transito selama 7 tahun ini sebagai pengungsi. Peristiwa kekerasan menunjukkan adanya aktor yang bermain sebagai kelas hegemonik dalam mempengaruhi wacana tentang "kesesatan" Ahmadiyah di tengah masyarakat, antara lain Tuan Guru dan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ahmadiyah, oleh beberapa elemen, dianggap telah merebut "jouissance" dari umat Islam "mainstream". Sebagai sasaran dari tindak kekerasan, JAI bukanlah muncul sebagai korban semata. Bersama dengan pengurus dan pemimpin organisasinya, JAI khususnya di Lombok melawan dengan caranya sendiri. "Jihad dengan pena", itulah cara mereka melakukan "counter hegemony" dalam perlawanannya. Mereka menangkis segala tuduhan dan fitnah yang dianggap telah membentuk identitas JAI di tengah masyarakat, terutama umat Islam di Indonesia. Di satu sisi, sebagian kelompok dan ormas Islam menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran sesat dan bukanlah bagian dari Islam. Namun, di sisi yang lain, JAI mati-matian menunjukkan identitas mereka sebagai orang Islam. Atas hal tersebut, kajian ini ingin menunjukkan bentuk-bentuk pertarungan hegemoni serta pola-pola yang menentukan identitas JAI di Lombok sebagai subjek atau gerakan sipil keagamaan.*

Kata kunci: *subjek, identitas, hegemoni, kekerasan terhadap JAI di Lombok*

Pasca-Orde Baru, Indonesia dilanda ketegangan dan kekerasan primordial berdasarkan perbedaan identitas. Perubahan iklim politik dari Orde Baru ke Orde Reformasi memunculkan peralihan bentuk kekerasan dan diskriminasi dari yang bersifat ideologis (terhadap komunisme) menjadi primordial, berdasarkan perbedaan identitas agama dan etnis. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Yayasan Denny JA.[71] Berdasarkan hasil survei tersebut, sejak 1998 telah terjadi 2.398 kasus kekerasan. Sebanyak 65 persen dari kasus kekerasan tersebut terjadi karena perbedaan agama atau paham keagamaan, 20 persen kasus perbedaan etnis, dan 15 persen kasus kekerasan gender. Pelakunya rata-rata dari elemen masyarakat.

Kasus kekerasan dalam kurun waktu lebih dari satu dekade terakhir di Indonesia cukup banyak didominasi oleh konflik berlabel agama. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, misalnya "keran" reformasi yang terbuka terlampau lebar, sehingga memungkinkan gerakan *underground* atau organisasi kemasyarakatan (ormas) muncul ke permukaan. Sementara itu, isu komunisme yang di masa Orde Baru menjadi pemicu kekerasan juga mulai menurun. Selain itu, ada perebutan pengaruh antar-organisasi massa berlabel agama.

Salah satu kasus kekerasan yang paling menyita perhatian justru mengakar pada konflik internal umat beragama, sebagaimana tampak dalam kekerasan yang dialami Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Peristiwa ini cukup meresahkan karena konfliknya terjadi dalam satu agama tertentu, yaitu Islam.

Penelitian mengenai Ahmadiyah kemudian menjadi penting untuk dikaji secara ilmiah, karena begitu banyak deretan kekerasan yang dialami pemeluk Ahmadiyah dalam kurun waktu lebih dari satu dekade. Penelitian ini berfokus pada kasus kekerasan terhadap warga JAI di Lombok. Ada beberapa alasan yang mendasarinya. *Pertama*, di daerah Lombok, kekerasan terhadap JAI berlangsung lama, yakni dari 1998 hingga 2010. *Kedua,* sampai saat ini, warga JAI yang selamat dari penyerangan itu telah mengungsi selama 7 tahun di Asrama Transito, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. *Ketiga,* meski menjadi pengungsi dan sasaran kekerasan selama setidaknya

71 http://m.liputan6.com/news/read/473517/Isi-dari-2398-kasus-kekerasan-65-kasus-agama,pada Minggu, 23 Desember 2012 dengan tajuk LSI: Dari 2.398 Kasus kekerasan 65 persen kasus agama. Hal ini merupakan hasil survey Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bersama Yayasan Denny JA dalam rangka mencari "Dicari Capres 2014 yang melindungi keberagaman".

satu dekade, warga JAI terkesan tegar dan memilih bertahan dalam koridor keimanannya.

Ahmadiyah sebagai sebuah gerakan keagamaan lahir di India pada akhir abad ke-19 dengan latar belakang kemunduran umat Islam di bidang agama, politik, ekonomi, sosial, dan sejumlah bidang kehidupan lainnya. Hal ini terjadi terutama setelah pecahnya Revolusi India tahun 1857, berakhir dengan kemenangan Inggris yang terpenting di Asia.

Pendiri Ahmadiyah adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, yang lahir pada hari Jumat, 13 Februari 1835 di sebuah dusun bernama Qadian, Gurdaspur. India, negara tempat lahirnya Ghulam Ahmad pada masa-masa itu, bahkan jauh sebelum Mirza Ghulam Ahmad lahir diwarnai oleh pergolakan, peperangan, dan perebutan kekuasaan. Negeri dengan mayoritas penduduk pemeluk Hindu dan Buddha itu pernah dikuasai oleh sebelas dinasti Mughal (1526-1858 M) selama lebih kurang delapan setengah abad.

Benih pertama "pohon" Ahmadiyah ditanam pada tanggal 23 Maret 1889 ketika Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mendirikan suatu jemaat guna memberikan bimbingan kepada segenap umat manusia supaya mengenal Tuhan Yang Hakiki dan menunjukkan jalan yang telah dirintis oleh Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Menurut pengikutnya, Jemaat Ahmadiyah seutuhnya bukan agama baru dan tidak pula membawa ajaran baru. Akidah dasar (kepercayaan pokok) anggota Jemaat Ahmadiyah adalah Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran yang terdiri dari 30 juz dan 114 surah, dan nabinya Nabi Muhammad SAW berdasar kepada 5 Rukun Islam dan 6 Rukun Iman. Selain itu, Jemaat Ahmadiyah melaksanakan sholat tetap menghadap kiblat (Kabah), dan berhaji ke Tanah Suci Mekkah. [72]

Terkait dengan penamaan, Jemaat Ahmadiyah merupakan nama aliran atau ajaran yang tidak merujuk pada nama pendirinya, Mirza Ghulam Ahmad. Namun, mereka ambil dari nama Nabi Muhammad SAW, yang memiliki dua nama yaitu Muhammad (nama sifat keagungan) dan Ahmad (nama sifat keindahannya). [73] Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, khalifah

72 Enam Rukun Iman itu adalah Iman kepada Allah, Iman Kepada Malaikat Allah, Iman pada Kitab Allah, Iman kepada Rasul Allah, Iman kepada Hari Akhirat, dan Iman kepada Qadha dan Qadar. Sedangkan 5 Rukun Islam itu adalah Mengucapkan 2 kalimat syahadat, Menunaikan Shalat, Melaksanakan Puasa, Mengeluarkan zakat, dan Menunaikan haji bagi yang mampu.

73 Penamaan inilah salah satu yang menjadi bahan polemik yang dipertanyakan oleh beberapa pihak yang kontra terhadap Ahmadiyah. Lihat Bab selanjutnya, JAI di Lombok sebagai sasaran komunal di Indonesia.

kedua Jemaat Ahmadiyah menjelaskan istilah jemaat bukan merujuk pada sebutan jumlah massa, melainkan lebih ditekankan pada tujuan bersama. Di dalam mengembangkan dakwah rohaninya, Jemaat Ahmadiyah senantiasa loyal dan patuh kepada undang-undang negara serta kepada pemerintah yang berkuasa (*Ulil Amri*) di manapun Jemaat Ahmadiyah berdiri. Kelompok ini juga mengenal istilah Bai'at untuk masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah.

Sepeninggal ayahnya, Mirza Ghulam Ahmad mulai menulis artikel yang dimuat di surat kabar. Tak cuma artikel di surat kabar, ketika lawan-lawannya semakin gencar menyerang Islam, ia mulai menulis buku tentang kebenaran agama Islam. Buku pertamanya berjudul *Barahiyn Ahmadiyah.* Menurut klaim Ahmadiyah, bagian pertama buku itu saja, berupa seruan dan pengumuman, mampu mengguncangkan dan menggemparkan seluruh negeri. Berkat buku itu, ia diakui sebagai seorang yang cakap. Lebih dari itu, Ghulam Ahmad dianggap sebagai seorang *mujaddid,* sang pembaharu. [74]

Pada tahun-tahun berikutnya dakwah yang dilakukan Ghulam Ahmad adalah untuk membangkitkan kembali semangat umat Islam dalam beragama. Ketika menyaksikan banyak kepercayaan ditumpahkan ke pundaknya oleh umat, yakinlah dia bahwa ia telah mendapatkan kepercayaan sebagai orang yang dipilih oleh Allah, sebagai Al-Masih yang dijanjikan untuk menegakkan kembali keagungan Islam. Mulailah bermunculan kontroversi yang tiada henti sampai kini. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dari Dusun Qadian, India ini mengumandangkan pengakuan sebagai Imam Mahdi dan Masih Yang dijanjikan atas perintah Tuhan.

Pada 1908 Ghulam Ahmad meninggal dikarenakan sakit diare yang parah serta migrain. Sepanjang hidupnya, ia telah menuliskan dan mewariskan 84 judul buku yang ditulisnya dalam bahasa Arab, Parsi, dan Urdu. Pada 1896, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad juga menulis karangan yang terkenal dan menjadi *masterpiece* nya, yaitu buku berjudul *Islami Ushul Ki Filasafi* dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia, termasuk dalam bahasa Indonesia yang berjudul "Filsafat Ajaran Islam". [75] Saat ini, Jemaat Ahmadiyah dipimpin oleh Hazrat Mirza Masroor Ahmad (atba),

74 Bagian pertama buku ini dicetak pada 1880, kedua pada 1881, ketiga 1880, dan bagian keempat pada 1884. Tulisan-tulisannya berisi penjelasan tentang Islam untuk melawan serangan dari para misionaris Kristen dan Hindu Ariya. Namanya pun mulai dikenal di masyarakat umum.

75 Dalam buku Filsafat Ajaran Islam (2008) yang diterjemahkan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia nama lengkap Ghulam Ahmad ditulis dengan Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, bukan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad.

yaitu Khalifah ke-5 penerus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad as. Sejak mulai didirikannya hingga tahun 2008, Jemaat Ahmadiyah telah berkembang dan tersebar di 185 negara di seluruh benua di dunia. Para pengikut atau Jemaat Ahmadiyah dikenal dengan sebutan *Ahmadi*.

Penelitian tentang Ahmadiyah memang sudah banyak dilakukan, namun sebagian besar menyorot permasalahan akidah dan telaah teologis, terutama yang kontra terhadapnya. Ulasan tentang kajian sosial dan budaya lainnya memang belum banyak ditemukan, khususnya dalam konteks kekinian. Permasalahan yang ingin saya sorot dalam hal ini ada 3 hal, yaitu Bagaimana sejarah kekerasan yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Lombok? Bagaimana bentuk pertarungan hegemoni antara JAI dengan pihak di luar nya dalam menentukan identitas JAI? Bagaimana mereka memandang dan memaknai kekerasan yang dialaminya secara berkala dan massif (1998-2010) pada level ideologis dan level praktis? Kajian ini menggunakan konsep subjek Lacanian, Hegemoni-nya Gramsci, serta Demokrasi Radikal (yang diradikalisasi oleh Laclau-Mouffe).

Jejak Jemaat Ahmadiyah sebagai Sasaran Kekerasan di Lombok

Masuknya ajaran Ahmadiyah yang lahir di India semasa kolonial ke Indonesia telah melalui proses panjang. Ajaran Ahmadiyah bisa dirunut dalam sejarah dan pelbagai peristiwa di Sumatra (Ahmadiyah Qadian), melalui perguruan Sumatra Thawalib yang pada waktu itu dipimpin oleh H. Abdul Karim Amrullah. Ada tiga orang pemuda saat itu dikirim belajar ke India, bukan ke Tanah Arab seperti kebiasaan yang dilakukan. Mereka kemudian mengirim kabar ke Sumatra tentang ajaran Ahmadiyah dan biaya hidup di Kota Qadian yang sangat murah. Informasi ini menarik para pelajar di Sumatra sehingga mereka berdatangan ke Kota Qadian.

Dalam Ahmadiyah sendiri, terdapat dua aliran yang kemudian berkembang masing-masing, yaitu Jemaat Ahmadiyah (Ahmadiyah Qadian) dan Gerakan Ahmadiyah (Ahmadiyah Lahore). [76] Dalam konteks Indonesia,

76 Qadian dan Lahore merujuk pada nama daerah tempat ajaran ini lahir. Sebelumnya aliran ini adalah satu, dari Mirza Ghulam Ahmad. Menurut salah satu Jemaat Ahmadiyah (Qadian), dalam sejarahnya, saat itu Ahmadiyah Lahore berambisi ingin menjadi pemimpin. Pada waktu pemilihan khalifah kedua, yang memilih khalifah harus istikharah dulu, siapa sebenarnya bayangan yang terlihat. Tiba-tiba ada suara pada malam hari, banyak orang mendengar, namanya Maulana Nasiruddin, anaknya Mirza Ghulam Ahmad. Waktu itu dia berumur 25 tahun. Yang Lahore tidak setuju karena seolah-olah yang memimpin masih terlalu muda. Akhirnya mereka memisahkan diri. Lahore tidak bisa berkembang sampai sekarang. Dalam sejarah yang berkembang Ahmadiyah Qadiyan.

Gerakan Ahmadiyah Indonesia secara resmi lahir pada 10 Desember 1928. GAI tidak mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. GAI juga tidak mengakui adanya sistem kekhalifahan seperti dalam Ahmadiyah Qadian.

Jemaat Ahmadiyah masuk ke wilayah Lombok sejak 1957. Ajaran ini dibawa oleh Jafar Ahmad, seorang asli Sasak yang memperoleh pengetahuan tentang Ahmadiyah dari Surabaya. Selanjutnya, Ahmadiyah berkembang sebagai ormas Islam seperti halnya Nadhlatul Ulama, Muhammadiyah, atau Nadhlatul Wathan (NW). Nadhlatul Wathan (NW) merupakan organisasi keagamaan terbesar yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Perkembangan Ahmadiyah Qadian yang lumayan pesat adalah di daerah Pancor, Lombok Timur.

Sampai saat ini, Ahmadiyah bagi para pengikutnya merupakan ajaran Islam. Hanya saja, Jemaat Ahmadiyah sudah mengakui kepemimpinan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi. Sedangkan bagi sebagian umat Islam lainnya, Imam Mahdi belum turun. Hal ini memerlukan dialog yang khidmat tanpa adanya kebencian. Semua elemen bisa mempercayai versinya masing-masing asal tidak keluar dari ajaran pokok Islam. Namun, JAI menyayangkan isu yang berkembang malah melebar ke hal-hal lainnya.

Sangkaan tentang Ahmadiyah sebagai agama bentukan penjajah diikuti pula dengan anggapan jika organisasi ini mendapatkan dana dari Barat. Atas hal ini, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Lombok menyanggah dengan mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan dana dari Inggris atau negara manapun. JAI malah menyebut dirinya sebagai *jemaat pengorbanan*. Dana itu dikumpulkan untuk membangun sarana peribadatan, syiar agama, dan untuk diberikan ke mubalig, karena tugas mubalig hanya menyebarkan ajaran Islam dan memperkenalkan bahwa Imam Mahdi sudah datang. Mubalig tidak boleh berbisnis. Dia hanya berfokus untuk menyebarkan ajaran Islam.

Jika ditilik secara historis, kemunculan Ahmadiyah di Indonesia dengan "ajaran yang berbeda" daripada umumnya menimbulkan perdebatan dan pertentangan. Pada awal kedatangannya di Tapak Tuan, ajaran Ahmadiyah sudah ditentang, salah satunya yaitu pelarangan warga Ahmadiyah untuk Sholat Jumat di rumah kaum Ahmadi pada 1926. Namun, setelah kejadian tersebut, pergolakan dan pertentangan lebih diwarnai setidaknya oleh perang wacana, yang mungkin lebih "bermakna". Pada 1928, terjadi perang wacana melalui publikasi. Dr. Abdul Karim Amrullah (ayah Hamka) merupakan orang pertama yang membuka perdebatan dengan menulis sebuah buku berbahasa Arab yang berjudul *Al-Qaulush Sahieh* yang berarti Sabda yang

Benar. Setelah buku ini terbit, kaum Ahmadiyah segera membalasnya dengan menerbitkan sebuah buku berbahasa Arab pula yaitu *Izharul Haqq* yang artinya Kumandang Kebenaran.

Perang wacana terus berlanjut hingga ke media massa di Zaman Kolonial. Majalah *Pedoman Masyarakat* yang terbit di Medan pada 1937 membuat tulisan-tulisan yang berisi serangan terhadap Ahmadiyah. Majalah *Panji Masyarakat* di Jakarta pada 1936 juga memuat tulisan dengan nada sama. Tulisan ini dibalas oleh tokoh Ahmadiyah Qadian waktu itu, Abu Bakar Ayub, yang menerbitkan brosur berjudul "Bantahan Lengkap". Pada 1933, perdebatan paling akbar terjadi antara kelompok Ahmadiyah aliran Qadiani dengan tokoh Pembela Islam (sebelum Persatuan Islam/Persis) di waktu itu. Perdebatan pertama terjadi di Bandung pada 14-16 April 1933 bertempat di Gedung Societet Ons Genoegen, Naripanweq, Bandung. Kubu Ahmadiyah diwakili oleh Maulana Rahmat Ali, Abu Bakar Ayub, dan Moh. Sadik. Pihak Pembela Islam diwakili A. Hassan dan pimpinan Partai Sarekat Islam (PSII) Bandung, yaitu Moh. Syafi'i.[77]

Besarnya perhatian terhadap mimbar tersebut menunjukkan Ahmadiyah bukanlah "benda asing" bagi masyarakat waktu itu. Jemaat Ahmadiyah tidak pernah berdiam diri. Mereka terus menangkis serangan tersebut dengan menerbitkan Majalah *Sinar Islam* mulai tahun 1932. Selain sebagai media penangkis, *Sinar Islam* juga memuat ajaran-ajaran yang bersumber dari karya-karya Mirza Ghulam Ahmad.

Sejak kedatangannya di Lombok pada tahun 1970-an, pada Era Soeharto, tidak ada konflik yang berarti terjadi di sana. Riak-riak konflik pada umumnya terjadi di tingkat pusat dan belum mengarah pada kekerasan fisik karena lebih didominasi perdebatan intelektual. Namun, sejak awal Reformasi, para JAI di Lombok menjadi sasaran kekerasan komunal hingga 2010. Seperti yang tersebut di atas, kekerasan massif dan terparah memang terjadi di Lombok. Adapun kronologi kejadian yang terjadi lebih dari sepuluh tahun lalu dan menimpa warga Ahmadiyah sebagai berikut:

Pertama, kasus penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Desa Keruak, Lombok Timur pada 1998. *Kedua,* kasus Ahmadiyah Sambielen pada tanggal

77 Berbagai organisasi yang menghadiri antara lain Muhammadiyah Garut dan Pekalongan, Persatuan Islam Bandung, Jong Islamic Bond (JIB) Bandung dan Betawi, serta Pendidikan Islam Bandung. Dari kalangan pers antara lain *Sinar Islam, Bintang Timoer, Pembela Islam, Soeara Pemoeda, Thahaja Islam, An Noer (Het Licht),* dan Pers Bureua Hindia Timoer. Dalam Iskandar Zulkarnain. 2005. Gerakan Ahmadiyah di Indonesia. Yogyakarta: LkiS. Hal 224-225.

22 Juni 2001, sebanyak 17 KK warga Ahmadiyah di Sambielen, Lombok Barat, diusir setelah rumah mereka dibinasakan. *Ketiga,* Kasus Ahmadiyah Pancor, Lombok Timur. Saat itu, terjadi pengrusakan dan pembakaran rumah milik Jemaat Ahmadiyah di Pancor sejak 9 September 2002 selama seminggu. Penyerangan diawali dengan pengkondisian berupa penyebaran ide dan penggiringan opini publik tentang kesesatan Ahmadiyah. Hal ini terjadi pasca-Seminar Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 Agustus 2002 di Asrama Haji Ampenan, yang dihadiri mayoritas pondok pesantren se-Nusa Tenggara Barat (NTB) Tak hanya itu, mereka juga menyebarkan buku-buku, brosur-brosur, dan majalah Sabili. Kejadian Pancor pada 2002 telah membuat mereka harus kehilangan harta benda dan meninggalkan kampung halaman di Lombok Timur. Mulailah mereka berpencar dan berpindah tempat. Mereka tidak peduli pergi kemanapun, asalkan bisa sejenak mendapatkan ketenangan untuk hidup berkeyakinan dan berusaha.

Keempat, kekerasan dalam skala kecil menyusul kejadian Pancor dan terjadi pada Jemaat Ahmadiyah di Sembalun Lawang dan Medas, Lombok Timur, pada 2002. Setahun kemudian, kasus penyerangan terjadi lagi di Empan, Sumbawa. *Kelima,* kasus paling besar dan beruntun mulai terjadi sejak warga Ahmadiyah ini menetap di suatu perumahan Bank Tabungan Negara (BTN) di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Mereka adalah Jemaat Ahmadiyah yang melakukan eksodus dari Lombok Timur dan harus meninggalkan kampung halamannya saat kejadian Pancor berlangsung. Warga JAI kemudian secara bersama-sama mengumpulkan uang untuk membeli sebuah komplek perumahan BTN tersebut yang dijual dengan harga murah.

Penyerangan pertama terjadi pada 19 Oktober 2005 bertepatan dengan bulan Ramadhan 1426 H. Peristiwa ini berawal dari pengajian yang digelar oleh seorang Tuan Guru (baca:sebutan untuk Kyai di Lombok) dan telah mengundang reaksi dari massa untuk melakukan penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Namun, kejadian tersebut tak membuat Jemaat Ahmadiyah meninggalkan wilayah tempat tinggalnya. Geram dengan hal tersebut, massa kembali menyerang pada 4 Februari 2006. Kejadian yang cukup parah ini mengulang pengalaman pahit yang dialami oleh warga Ahmadiyah setelah terusir dari Lombok Timur.

Setelah mengalami pengusiran dan amukan massa secara berantai sejak 1998, secara otomatis warga JAI tergabung menjadi kelompok orang yang mencari suaka dan tempat untuk bernaung. Akhirnya, warga JAI menempati

sebuah gedung kosong yang sudah tak terpakai lagi di kota Mataram. Gedung atau Asrama Transito—eks gedung transmigrasi—adalah tempat mereka bernaung pasca kerusuhan 4 Februari 2006 silam. Rumah-rumah warga JAI di perumahan BTN Ketapang saat itu sudah tinggal puing karena dihancurkan massa, sehingga mereka tidak mempunyai tempat untuk tinggal lagi.

Keadaan pengungsian para JAI, yaitu di Asrama Transito terbilang cukup miris. Gedung pengungsian yang berusia tua itu sudah tidak terawat lagi. Dengan ruangan seadanya, fasilitas listrik yang sangat terbatas menjadi pemandangan di pengungsian. Tak hanya itu, ruangan tempat tinggal mereka hanya dibatasi oleh spanduk-spanduk bekas, dengan luas hanya 2 meter untuk tiap keluarga. Pada malam hari, gedung itu berubah seperti tempat tak berpenghuni karena tidak ada listrik atau cahaya yang terlihat, kecuali di Mushola yang terletak agak belakang asrama tersebut. Mirisnya lagi, warga JAI ini sampai sekarang masih kesulitan untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Meskipun kepala daerah sempat mengatakan lewat media untuk memfasilitasi pembuatan KTP bagi warga JAI, tapi hal itu belum terealisasi dengan nyata hingga saat ini.[78]

Aktor dan Tirai Kekerasan Simbolik

Apabila melihat langenggnya kekerasan dan penyerangan terhadap JAI, dapat dipastikan setidaknya ada aktor-aktor yang berperan dibaliknya. Di Lombok, kekuatan organisasi Islam yang ada di Lombok dapat dipetakan, seperti Nadhlatul Wathan (NW), Muhammadiyah, atau Wahabi. Tak ketinggalan pula Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki otoritas, salah satunya untuk menentukan sesat atau tidaknya suatu ajaran.

Ajaran Ahmadiyah menurut versi MUI adalah salah satu paham yang berasal dari Pakistan, masuk ke Indonesia saat penjajahan. Paham yang utama berbeda dari umat Islam lain itu ialah Ahmadiyah mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai pemimpin dan nabi atau Rasul serta menerima wahyu. Bahkan, dikatakan oleh MUI jika Ghulam Ahmad menuding orang yang tidak percaya padanya sebagai kafir. Hal inilah yang menjadi patokan ulama-ulama Islam bahwa Ahmadiyah dianggap menyimpang atau sesat. Namun, karena Ahmadiyah masuk Indonesia pada Zaman Belanda, secara organisasi mereka langsung mendaftarkan di pemerintah dan tercatat

78 Berdasarkan wawancara dengan ibu-ibu pengungsi di Transito, 17 Desember 2010 di Asrama Transito, Mataram.

sebagai organisasi yang sah. Ada sebuah legalitas. Itulah yang dipedomani sampai saat ini bahwa Ahmadiyah itu legal.[79]

Dalam sejarahnya, fatwa MUI baik pusat maupun daerah, yaitu pada tahun 1980 dan 2005 telah menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Untuk daerah Lombok, Fatwa MUI tahun 1984 soal Ahmadiyah merupakan pemicu kekerasan untuk pelarangan Ahmadiyah di pulau tersebut. Fatwa MUI menjadi referensi untuk pelarangan Ahmadiyah di Pulau Lombok, dan MUI bersama dengan LPPI aktif melakukan kampanye untuk melarang Ahmadiyah di Pulau Lombok. Termasuk salah satu surat dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lombok Barat yang dialamatkan ke Bupati Lombok Barat tentang sebuah rekomendasi yang memohon perhatian pemerintah daerah agar menurunkan Pelarangan Operasional atas Jemaat Ahmadiyah yang sudah menyimpang dari ajaran Islam. Agaknya inilah yang mendasari keluarnya Surat Keputusan (SK) dari Bupati Lombok Barat tanggal 10 Juli tahun 2001 tentang Pelarangan dan Penghentian Penyebaran Ajaran/Paham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat.

Pasca-Reformasi, dengan maraknya kembali kekerasan terhadap Ahmadiyah, Bupati Lombok Timur mengeluarkan lagi surat edaran tentang larangan kegiatan penyebarluasan ajaran Ahmadiyah Qadian baik secara lisan maupun tertulis di wilayah Lombok Timur. Ada pula "AMANAH" (Aliansi Masyarakat Anti Ahmadiyah) Kabupaten Lombok tengah yang menuliskan pernyataan sikap mereka dengan menyampaikan somasi atas keberadaan Ahmadiyah di sana. Kepala Kejaksaan Negeri Selong juga turut mengeluarkan Surat Keputusan No: Kep.11/IPK.32.2/L-2.III.3/11/83 tentang Pelarangan terhadap Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Cabang Pancor Lombok Timur sebagai upaya untuk memelihara kerukunan hidup umat beragama khususnya umat Islam di sana.[80]

Desire dan Pemaknaan JAI Pasca Kekerasan Komunal di Lombok

Ragam konflik yang dialami oleh JAI di Lombok dengan berbagai kelompok yang ada membuatnya memaknai kekerasan pada level ideologi dan praktis. Pemaknaan tersebut telah membentuk identitas mereka yang disertai

79 Berdasarkan wawancara dengan Muhsin mewakili Majelis Ulama Indonesia DI. Yogyakarta pada 31 Maret 2011 di Kantor MUI DIY.

80 Hal ini berdasarkan pertemuan antara Bupati Lombok Timur, Ketua DPRD Tingkat II Lotim, Kepala Kantor Departemen Agama dan MUI Lotim tanggal 5 November 1983 yang secara bulat menyetujui dan mendesak pihak yang berwajib agar menghentikan kegiatan Ahmadiyah di Lombok Timur.

dengan keunikan pola bertahan. Ada semacam pemaknaan religiusitas yang muncul. Dari beberapa kalangan yang tinggal di pengungsian Transito, kaum remaja (*Khudamul Ahmadiyah* dan *Nasiratul Ahmadiyah*) cukup menarik perhatian. Remaja, umumnya memiliki jiwa muda yang masih penuh dengan idealisme kebebasan. Mereka juga sarat dengan sifat labil. Namun, sebagian dari remaja Ahmadiyah yang hidup di Transito seolah sudah terinternalisasi oleh nilai-nilai Ahmadiyah yang diajarkan, yaitu keteguhan, kesabaran, dan kedamaian.

Malik misalnya yang harus mengungsi ke Jawa Barat dan terpisah dari orang tua saat kejadian Pancor 2002. Akan tetapi, dia menganggap hal tersebut sebagai pengorbanan untuk semakin kuat bertahan. Ada sebuah kalimat yang dilontarkan seorang remaja Ahmadiyah tentang teror yang mereka hadapi, "Pak, kalau kami masih disuruh keluar dari Ahmadiyah, gini aja suruh kami baris semua, tembak kami satu-satu. Itu kalau bapak tidak mengizinkan kami jadi Ahmadiyah".[81]

JAI dituding ekskusif karena memiliki masjid sendiri dan tidak beribadah bersama umat Islam lainnya. Akan hal itu, Syahidin[82] mengatakan sebenarnya mereka ingin beribadah bersama umat Islam lainnya, karena semua masjid adalah tempat ibadah. Hanya saja kekerasan yang dialami dalam satu dekade belakangan telah membuat kelompok ini merasa tersingkir. Warga Ahmadiyah merasa kurang nyaman sholat di "Masjid Non-Ahmadiyah", karena apabila ada ceramah atau khutbah selalu menyudutkan Ahmadiyah dengan pelabelan kafir atau "sesat". Warga JAI tidak mau mendengar semua itu. Akhirnya mereka sholat di tempat sendiri, yaitu mushola kecil di tempat pengungsian.

Fenomena pengungsian warga JAI ini telah menarik perhatian pihak-pihak luar seperti kalangan wartawan, mahasiswa, peneliti, dan LSM baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagian dari mereka mendatangi Transito untuk berdialog. Ada pula yang memberikan sumbangan kebutuhan sehari-hari bagi warga JAI. Yang cukup aktif untuk berkunjung dan membantu advokasi JAI adalah Lembaga Studi Kemanusiaan (Lensa), yang terlibat dalam mendampingi para pengungsi terutama di ranah sosial dan hukum. Lensa, yang saat itu diwakili oleh Yusuf memaparkan :

81 Kutipan kata kata seorang remaja JAI berdasarkan wawancara dengan para pengungsi remaja Jemaat Ahmadiyah Indonesia pada 15 Desember 2010 di Asrama Transito.

82 Wawancara dengan Syahidin Koordinator Pengungsi. 14-16 Desember 2010 di Asrama Transito

> "Kami menganggap pemerintah terkesan hanya menyikapi, tapi tidak berpikir menyelesaikan masalah. Katanya mereka mau dipindah ke Sekotong, pulau terpencil. Asetnya mau dibeli, tapi harga yang ditawarkan belum sesuai. Setelah disana, mereka berharap bisa dibuatkan sekolah, tempat yang layak, sehingga tidak dianggap makhluk asing di NTB. Orang Ahmadiyah dianggap penyakit, harus dibuang, ga peduli mau dilempar, mau seperti apa. Itu yang kami tangkap. Katanya sempat disuruh ngungsi ke Australia."[83]

Keadaan yang tak kunjung pasti dan belum adanya solusi yang jitu bagi JAI di Lombok telah membuat Pemerintah Provinsi bertindak "aman". Pada tahun 2011, Gubernur melalui Kesbangpoldagri melakukan program pembinaan (Tausiah) selama 6 bulan. Pembinaan ini dilakukan karena desakan dari beberapa Ormas Islam yang dipimpin oleh para tokoh agama dengan mengatasnamakan umat kepada Gubernur Provinsi NTB. Akan tetapi, kegiatan tersebut sama sekali tidak menyentuh substansi yang dibutuhkan oleh JAI.

Salah satu kebutuhan atau *need* yang diharapkan JAI adalah bisa mengartikulasikan suara mereka, sehingga Liyan menerima kehadiran mereka. Selain itu, agar pemerintah menjamin kehidupan mereka untuk hidup dengan tenang. Ketika ditanyakan pada Pimpinan Wilayah JAI di Lombok, Jauzi, tentang hak-hak warga Ahmadiyah secara organisasi, dia melihatnya dari dua hal. *Pertama,* organisasi hanya bisa ikut campur dalam hal dukungan kerohanian (melalui mubalig), dan sebagai fasilitator dalam upaya advokasi dan negosiasi dengan pemerintah atau pihak lain. *Kedua,* selain hal-hal pertama tadi, organisasi tidak memiliki hak untuk intervensi baik berkaitan dengan masalah relokasi, transmigrasi, dan pemulihan aset. "Itu adalah hak warga, silahkan pemerintah berdialog dengan mereka. mau dijual atau tidak hak mereka. itu kan kekayaan mereka, bukan organisasi", jelasnya. [84]

Janji-janji atau tuntutan tersebut hendak dicapai melalui kelas berkuasa. Namun dalam hal ini, kelas berkuasa mengalami dilema. Di satu sisi mereka tidak bisa melarang Ahmadiyah karena legalitas dan konstitusi yang menjamin keberadaan JAI. Di sisi lain ada ketakutan dikecam oleh umat Islam lainnya, yang secara jumlah jauh lebih besar dibandingkan JAI.

---

83 Wawancara dengan Yusuf, Pegiat Lembaga Studi Kemanusiaan (Lensa). 14 Desember di kantor Lensa.

84 Wawancara dengan Pimpinan Wilayah Ahmadiyah Lombok Barat, Ir.Jauzi.2010. 16 Desember 2010 di Rumah Pribadinya di Lombok Barat.

Dunia simbolik juga memiliki *demand*, yaitu agar JAI mengubah akidahnya seperti ajaran Islam "mainstream" lainnya. Lalu, tuntutan atau kebutuhan masyarakat mana yang hendak diwujudkan? Negara dalam hal ini pemerintah akhirnya menanggapinya dengan setengah-setengah. Adanya pembiaran, pengabaian, dan membuat pengungsi berdiam di Transito menjadi indikasinya.

Desire, dalam pandangan Lacan, hanya akan dialami setelah subjek merasa tidak pernah puas akan dunia simbolik atau Liyan. Ketika subjek memahami bahwa ternyata hukum dan dunia verbal tidak bisa memuaskan sama sekali, saat itulah muncul hasrat untuk menemukan kembali objek a (baca: *autre*). *Desire* merupakan upaya untuk menemukan kembali jejak-jejak yang menyebabkan subjek mengalami *lack.* Dalam tataran simbolik, kebutuhan yang disuarakan secara verbal disebut *demand* atau tuntutan. Munculnya tuntutan berdasarkan *need* yang semata-mata merupakan kebutuhan organik atau hewani untuk bertahan.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Lombok senyatanya merupakan bagian dari entitas Islam di Indonesia. Ajaran ini tumbuh dan berkembang sebagai sebuah gerakan perluasan dan pendalaman revolusi Demokrasi dalam arti menciptakan ruang-ruang politik baru, yaitu sebagai gerakan sipil keagamaan. Keberadaan JAI dipengaruhi oleh totalitas yang menjadi identitas hegemonik dan *par excellence* politis. Disebut identitas dalam arti bahwa totalitas merepresentasikan seluruh unsur-unsur pembentuknya baik secara kolektif maupun tunggal. Pembicaraan ini menjadi penting ketika melihat bagaimana representasi para pengungsi JAI di Lombok dalam identitas hegemonik. JAI sebagai salah satu identitas dan menjadi kekuatan sosial telah diartikulasikan oleh kelompok kepentingan yang ada, baik oleh ulama, tokoh agama, ormas Islam, ataupun elemen masyarakat lainnya. Kelompok-kelompok ini merepresentasikan JAI dalam kancah politik identitas Islam secara khusus, bahwa JAI adalah kelompok non-Islam. Kelompok yang mengeklusikan JAI seperti MUI menganggap apa yang diklarifikasi atau apapun argumentasi dari JAI adalah strategi untuk bisa mengelabui umat Islam di Indonesia. Strategi itu disebut *Takiyah.*

Apabila menggunakan bahasa-nya Lacan, Ahmadiyah dipandang sebagai elemen yang telah merebut *jouissance* atau kenikmatan (baca: ketentraman) umat Islam *mainstream* di Indonesia. JAI dianggap sebagai musuh atau objek kebencian yang menyalahi akidah Islam ortodoks. Keberadaan Ahmadiyah yang membawa "wajah lain" dianggap telah membuat kekacauan dalam entitas Islam. Tak hanya menimbulkan kekacauan, JAI juga dianggap telah

menghalangi umat Islam untuk mencapai cita-citanya. Apabila JAI masih meyakini ajarannya tersebut, maka tak ada alasan mereka untuk diterima dalam masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan bentuk-bentuk diskursif yang membuat JAI sebagai *evil* atau *enemy*.

Jihad dengan Pena : Artikulasi Subjek yang "Berdaya"

Persoalan JAI di atas telah dibaca melalui pisau analisis hegemoni dan pembentukan identitas. Sebagai korban kekerasan, JAI menjadi subjek yang "tak berdaya". Namun, ketidakberdayaan telah melahirkan keberdayaan, sesuatu yang menjadi hasil dari ideologi dan strategi JAI. Hal ini ada kaitannya dengan hegemoni yang tidak bisa dilepaskan dari subjek politik. Meskipun menjadi kelas subordinasi dan korban kekerasan, JAI juga merupakan subjek yang memiliki artikulasi. Dalam praktik diskursif, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, khususnya di Lombok mati-matian membentuk identitasnya sebagai bagian dari Islam. Perjuangan ini terasa begitu sulit bagi JAI, karena mereka berhadapan dengan bangunan besar, yaitu entitas Islam di Indonesia. Oleh karena itu, mereka memerlukan strategi, yang dalam bahasa-nya Gramsci adalah untuk melakukan *counter hegemony*.

Dalam level ideologis, para warga JAI ternyata semakin memperjelas identitas mereka sebagai orang Islam dengan memperbanyak literatur dan tulisan yang menyatakan bahwa mereka merupakan orang Islam. Mereka juga mengatakan jihad dengan pedang bukanlah masanya sekarang. Istilah yang digunakan saat ini adalah jihad dengan pena, dengan lisan dan tulisan. Ahmadiyah memperjelasnya dengan mengutip kata-kata dalam Al-Quran bahwa untuk memperbaiki ajaran yang "sesat", bukan dengan kekerasan, makian, celaan, tapi dengan nasehat yang hikmah.

Pada level praktis mereka melakukan tindakan konkrit dalam menyebarkan dakwahnya. Jemaat Ahmadiyah menggunakan berbagai elemen ideologi untuk menancapkan hegemoninya. Usaha tersebut dilakukan jemaat ini untuk melebarkan sayap ajarannya. Jemaat Ahmadiyah memiliki TV Internasional, "Muslim Television Ahmadiyya" (MTA) di London, yang mengudara selama 24 jam tanpa iklan. Semuanya memberitakan tentang agama Islam dan perilaku manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jemaat Ahmadiyah juga memiliki banyak koleksi Video tentang ajaran dan perkembangannya di berbagai negara khususnya di Eropa.

Tak terkecuali banyak pula media yang mereka hasilkan untuk menulis tentang Islam dan Ahmadiyah, termasuk wadah untuk menangkis pihak luar yang menuliskan segala hal yang tak sesuai dengan Ahmadiyah.

Khusus untuk Jemaat Ahmadiyah Indonesia juga memiliki sekolah Mubalig Nasional di Parung, Bogor. Bahasa pengantar sekolah ini adalah bahasa Urdu, dan juga bahasa lainnya seperti bahasa Arab, Jerman, dan Perancis.

Bagi JAI, menjadi *Ahmadi* adalah fantasi menuju pencapaian hasrat atau *desire* mereka, yaitu Mahkamah Ilahi. Bagi JAI, penderitaan adalah kenikmatan yang terselubung. Harapan Jemaat Ahmadiyah sebenarnya merupakan harapan kelompok tersubordinasi yang tidak ingin identitasnya dibentuk dan ditentukan oleh elemen lain yang memiliki kuasa.

Harus diakui keterbukaan itu kadang terhalang oleh keinginan untuk selalu menguasai dan muncul sebagai yang paling "benar". Di sinilah terletak pentingnya dialog dalam sebuah artikulasi wacana karena bukanlah suatu hal yang bijak untuk men-*judge* satu kelompok berdasarkan keyakinan yang dianutnya. Tarik ulur dan perdebatan semacam ini bisa jadi merupakan sebuah proses yang normal dalam kehidupan sosial budaya : ada pertarungan, ada perebutan. Itulah ruang-ruang yang disediakan untuk perubahan demokrasi.

Daftar Pustaka

Ahmad, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. 2008 (cet Indonesia). Mukhlis Ilyas (penerj.). *Filsafat Ajaran Islam.* Bogor : Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Al Hadar, Abdullah Hasan. 1980. *Ahmadiyah Telanjang Bulat di Panggung Sejarah.* Bandung : Al.Ma'aruf

Ali, Suryadharma. *Ultimatum Suryadharma Ali.* Tempo. Edisi 13-19 September 2010

Basit, Ali. 2005. *Jawaban Jemaat Ahmadiyah Indonesia Atas Pertanyaan Komisi VIII DPR RI pada Temu Wicara Tanggal 31 Agustus 2005.* Bogor : Dokumen Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Dokumen-dokumen Dewan Pengurus Wilayah Jemaat Ahmadiyah Lombok Barat. 2002-2010

Mouffe, Chantal. 1979. Hegemony and Ideology in Gramsci. Dalam Chantal Mouffe (ed). *Gramsci and Marxist Theory.* London-Boston : Routledge

Mustafa, Aris, dkk. 2005. *Ahmadiyah : Keyakinan yang Digugat.* Jakarta : Pusat Data dan Analisa TEMPO

Stavrakakis, Yannis. 1999. *Lacan and The Political.* London : Routledge

Sunardi, St. *Logika Demokrasi Plural-Radikal*. Desember 2012. Yogyakarta : Jurnal Ilmu Humaniora Baru Vol.3 No.1

Tim Klarifikasi Tadzkirah Jemaat Ahmadiyah Indonesia. 2003. *Klarifikasi atas Telaah Buku Tadzkirah*. Jakarta : Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Zulkarnain, Iskandar. 2005. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.

Wawancara dengan Ir. Jauzi, Pimpinan Wilayah Ahmadiyah Lombok Barat. 16 Desember 2010 di Rumah Pribadinya di Lombok

Wawancara dengan Ust Maruf, salah satu anggota MUI NTB. 02 Januari 2012 di Sumbawa Barat

Wawancara dengan Muhsin, salah satu anggota MUI Yogyakarta,. 31 Maret 2011 di Kantor MUI DIY

Wawancara dengan Nasiruddin Ahmadi Penasehat Ahmadiyah di Lombok. 15 Desember 2010 di Asrama Transito

Wawancara dengan Remaja Ahmadiyah. 15 Desember 2010 di Asrama Transito

Wawancara dengan Syahidin Koordinator Pengungsi. 14-16 Desember 2010 di Asrama Transito

----------. 22-23 Juli 2011 di Asrama Transito

Wawancara dengan Yusuf, Pegiat Lembaga Studi Kemanusiaan (Lensa). 14 Desember di kantor Lensa.